

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap umat dalam persekutuan Gereja sekarang ini dengan kapasitasnya masing-masing mengambil peran dalam usaha perkembangan Gereja. Tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam aspek nilai-nilai rohani, sosial, dan persaudaraan. Upaya memperoleh nilai-nilai Kristiani semestinya tidak terlepas dari peran serta umat. Umat wajib menunjukkan partisipasinya sebagai bagian dari Gereja. Melalui sakramen baptis, umat telah dipanggil untuk menjadi bagian dari Gereja bukan hanya dalam relasinya dengan Allah melainkan umat juga mesti berpartisipasi dalam mewujudkan hidup dan misi Gereja sebagai umat Allah.¹ Umat didorong untuk menyadari jati dirinya sebagai bagian dari Gereja dan ikut serta memberikan sumbangan kepada Gereja. Sumbangan dapat merambah dalam berbagai bentuk seperti pemberian uang, barang, bahkan dapat berupa tenaga atau jasa.

Upaya Gereja untuk meningkatkan kemandirian umat saat ini mengalami banyak hambatan dan tantangan. Permasalahan yang sering dihadapi tidak saja sekedar kemampuan finansial memberikan sumbangan kepada Gereja, tetapi kurangnya partisipasi umat untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan Gereja yang disebabkan oleh sikap umat yang minim kesadaran. Perkembangan teknologi masa ini menciptakan beragam perilaku dan pola hidup manusia yang berpengaruh pada keterlibatannya di Gereja. Umat menganggap bahwa memberikan uang dan barang saja sudah cukup untuk membangun Gereja. Namun perkembangan Gereja bukan saja dilihat dari kemampuan umat dalam memberikan sumbangan demi

¹ Post Sinode II, *Menjadi Gereja Partisipatif: Pedoman Pastoral Keuskupan Pangkalpinang* (Jakarta: Obor, 2012), hlm. 136.

pembangunan fisik Gereja melainkan juga dilihat dari kualitas kemandirian umat sebagai bentuk kesadaran kehidupan menggereja.

Upaya kemandirian Gereja telah dihidupi dari masa Perjanjian Baru. Peristiwa Pentakosta memberikan nafas baru kepada para pengikut Yesus untuk melanjutkan misi yang telah dimulai oleh Yesus. Persekutuan yang dibuat oleh jemaat perdana memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Gereja saat ini. Persekutuan para pengikut Yesus ini berpikir bahwa mereka diutus kepada bangsa Israel guna memberi kesempatan kedua kepada bangsa itu, walaupun dahulu mereka telah menolak Yesus sebagai Mesias.² Pada awal mula Kekristenan, jemaat perdana hidup dalam situasi yang ditolak dan penuh dengan penganiayaan, tetapi mereka tetap menjalankan cara hidup yang diajarkan Yesus sehingga Gereja masih terus berkembang hingga saat ini.

Salah satu cara hidup yang masih dijalankan hingga saat ini ialah ketaatan pula jemaat kepada pemerintah. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma (13:1-2) mengatakan bahwa pemerintah itu berasal dari Allah sehingga sikap taat kepada pemerintah tidak dilihat sebagai sikap melawan atau bertentangan dengan Allah sebaliknya jika ia melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah. Selain itu, taat kepada pemerintah dapat menjamin adanya keamanan yuridis, meskipun dalam realitasnya mereka tetap hidup dalam tekanan.

Sikap taat kepada pemerintah ditunjukkan jemaat perdana dengan cara membayar pajak kepada kaisar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.³ Persoalan mengenai pajak menjadi sangat penting karena pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar bagi suatu negara selain badan usaha milik negara. Kebijakan pajak pemerintah bertujuan untuk membiayai anggaran dan keperluan rumah tangga suatu negara. Umumnya masyarakat akan menerima subsidi sebagai bentuk imbalan atas kewajiban masyarakat dalam membayar pajak. Subsidi yang diterima

² Stephen B. Bevans dan Roger P. Schroeder, *Terus Berubah Tetap Setia*, Penerj. Yosef Maria Florisan (Maumere: Ledalero, 2021), hlm. 17.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1122.

oleh masyarakat dapat berupa fasilitas yang memudahkan aktivitas masyarakat dalam berbagai hal seperti pembangunan jalan untuk memudahkan transportasi, pemasangan listrik, pembuatan bak air, pembangunan rumah sakit, dan pembangun sekolah.

Selain memberi fasilitas yang memudahkan aktifitas masyarakat, pajak juga memberi masyarakat perlindungan dari berbagai ancaman. Anggaran negara yang diperoleh melalui pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan pertahanan negara. Dalam hal ini, negara bukan sebagai lembaga asuransi yang menuntut adanya premi terlebih dahulu kemudian baru ada perlindungan.⁴ Tugas utama negara adalah melindungi hak dan kehidupan warga negara, sehingga dalam praktiknya negara dan warga negara dituntut untuk memenuhi kewajiban secara bersamaan. Negara harus melindungi warganya sedangkan warga negara harus patuh terhadap kebijakan negara.

Pajak bukan lagi menjadi kebijakan baru bagi orang Yahudi. Pajak yang berlaku pada zaman Yesus telah ada sejak masa Perjanjian Lama. Dalam Kitab Kejadian (41:34), Yusuf meramal bahwa akan ada tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kelaparan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah kebijakan pemungutan seperlima dari hasil pertanian dan perkebunan di seluruh Mesir selama tujuh tahun kelimpahan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menghindari adanya krisis ekonomi dalam tujuh tahun kelaparan yang akan datang. Contoh pajak lain pada Perjanjian Lama termuat dalam kitab Keluaran (30:11-16), Allah meminta Musa agar orang Israel memberikan uang pendamaian kepada Allah sebagai Raja Israel.

Pada masa Yesus, pajak menjadi persoalan hangat di antara bangsa Yahudi. Orang Yahudi merasa terbebani dengan adanya kebijakan pajak pemerintah Romawi yang sangat besar. Situasi politik yang hancur dan wilayah yang dikuasai Romawi membuat bangsa Yahudi dipandang dan diperlakukan sebagai wilayah jajahan. Roma tidak akan memberi tekanan atau ancaman kepada orang Yahudi selama mereka tidak memberontak dan tetap membayar upeti. Ketegangan yang terjadi di Yahudi disebabkan oleh keberatan masyarakat karena mereka wajib

⁴ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Litera, 2014), hlm. 28.

membayar pajak dua rangkap. Mereka tidak hanya wajib membayar pajak kepada kaisar Romawi tetapi juga dipaksa untuk mengongkosi raja setempat dan pegawai-pegawainya.⁵ Gaya hidup raja setempat, raja Herodes Agung yang memerintah saat itu tidaklah hemat. Ia meniru gaya hidup kaisar dan para penguasa Romawi serta berusaha memajukan kebudayaan Yunani sehingga orang-orang pribumi menjadi korban.⁶

Pada Matius bab 22 ayat 21, sebuah pertanyaan dilontarkan orang-orang Farisi kepada Yesus tentang kepada siapa seharusnya mereka patuh. Apakah mereka harus taat kepada Kerajaan Allah ataukah kepada otoritas pemerintah saat itu? Pertanyaan tersebut muncul karena adanya keresahan masyarakat Yahudi terhadap pemerintah Romawi mengenai kewajiban membayar pajak. Di samping itu, pertanyaan mereka sekaligus mau menjebak Yesus yang dilihat sebagai pembawa ajaran palsu. Jika Yesus membenarkan bahwa pajak harus dibayarkan kepada kaisar, maka Ia akan kehilangan penghargaan dari kaum nasionalis religius. Tetapi, jika Yesus menolak membayar pajak kepada kaisar, Ia dapat ditahan sebagai kaum revolusioner politik.⁷ Mengetahui kemunafikan mereka, Yesus memberikan jawaban yang dapat dipahami dalam tiga cara. *Pertama*, orang tidak perlu membayar pajak apapun kepada kaisar karena segala sesuatu adalah milik Allah (Im. 25:23); *kedua*, orang wajib membayar pajak kepada kaisar karena ia adalah wakil Allah (Rm. 13:1-7; 1Ptr. 2:13-17); *ketiga*, orang boleh membayar pajak kepada kaisar tetapi hanya mengakui kekuasaan relatif saja, sedangkan kekuasaan kepada Allah mesti diutamakan (Rm.17:24-27).⁸

Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma.(13:1-7), mewajibkan jemaat perdana untuk taat kepada kebijakan pemerintah. Pemerintah itu ditetapkan oleh Allah sehingga siapapun yang melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah, selama kebijakan yang diberlakukan tidak menyimpang dari ajaran Allah maka otoritas penguasa Romawi menjadi keputusan Allah juga. Ada dua hal yang menjadi kekhawatiran Paulus, *pertama*, situasi orang Kristen di Roma sebagai kaum minoritas dan *kedua*, adanya pemahaman orang Kristen yang menganggap

⁵ C. Groenen, *Pengantar ke dalam Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 36.

⁶ *Ibid*, hlm. 37.

⁷ Dianne Bergant & Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru* (Jakarta: Kanisius, 2012), hlm. 66.

⁸ Daniel Durken, *Tafsir Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2022), hlm. 128.

bahwa mereka telah mendapat kebebasan baru melalui Kristus sehingga mereka tidak perlu tunduk kepada penguasa Roma. Paulus mengkhawatirkan adanya sikap anarki yang akan muncul dari pandangan demikian sehingga ia merasa wajib untuk membetulkannya.⁹ Melalui suratnya, Paulus memperbaiki pandangan orang Kristen. Pemerintah tidak dilihat sebagai kelompok oposisi dari Allah melainkan berada di bawah Allah. Orang Kristen memiliki kewajiban untuk taat kepada penguasa Romawi tanpa menempatkannya sebagai kekuasaan mutlak.

Yesus menegaskan bahwa tidak salah apabila umat Kristen juga patuh kepada Pemerintah. Ia memberi contoh sebagai warga negara yang baik dengan patuh terhadap segala aturan dan hukum yang berlaku termasuk kewajiban membayar pajak (Mat. 17:24-27). Jawaban Yesus menegaskan kewajiban membayar pajak kepada kaisar atas dasar bahwa koin adalah milik kaisar. Bangsa Romawi menggunakan koin yang diukir dengan gambar kepala kaisar yang berkuasa pada masa itu. Kaisar yang berkuasa pada masa itu adalah kaisar Tiberius, sehingga bangsa Yahudi yang sedang berada dalam otoritas pemerintah Romawi menggunakan koin kaisar Tiberius.

Ajaran Yesus tentang kesadaran membayar pajak, memberi gambaran bahwa umat memiliki dua status yakni sebagai warga negara dan bagian dari Kerajaan Allah. Sebagai warga negara, umat diwajibkan melaksanakan aturan-aturan dan hukum yang ditetapkan oleh negara. Sedangkan sebagai bagian dari Kerajaan Allah, umat wajib mengarahkan seluruh dirinya kepada Allah dalam kehidupan menggereja. Kewajiban kepada Allah ditunjukkan dengan partisipasi umat dalam mewujudkan misi Gereja. Adapun kewajiban umat sebagai dukungan terhadap kemandirian Gereja misalnya membayar iuran paroki. Namun di lain sisi, umat juga memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara.

Permasalahan yang sering terjadi ialah pemahaman umat yang sangat tradisional menganggap bahwa dengan membayar iuran paroki saja sudah cukup untuk mendukung perkembangan kehidupan Gereja. Perkembangan Gereja saat ini hanya dilihat dari wujud fisik, sehingga partisipasi umat sering kali dalam bentuk sumbangan finansial dan material seperti iuran dan pemberian hasil panen. Pada satu sisi, Gereja membutuhkan finansial untuk membangun Gereja dan memenuhi

⁹ Dianne Bergant, *op. cit.*, hlm. 266.

kebutuhan harian. Namun di sisi lain, Gereja juga membutuhkan model sikap yang jauh lebih militan daripada sekedar sumbangan demi kemegahan bangunan gereja ataupun membayar iuran tepat waktu. Gereja membutuhkan adanya partisipasi umat dalam banyak aspek baik dalam pembangunan fisik gereja maupun dalam upaya membangun komunitas Gereja yang loyal kepada Tuhan. Kemandirian Gereja tak dapat dilihat dari kemampuan sumber daya umat saja. Kemandirian Gereja berkaitan juga dengan peranan umat dalam relasinya dengan umat lain dalam membangun Gereja yang berkualitas.

Selain pemahaman yang salah, minimnya kesadaran dalam diri umat mempengaruhi kuantitas dan kualitas partisipasi umat dalam pembangunan Gereja. Umat menganggap bahwa pembangunan Gereja menjadi tugas utama para biarawan dan pengurus paroki sehingga umat tidak perlu ikut campur urusan Gereja. Kesadaran yang mesti ditanam ialah bahwa setiap umat yang dibaptis merupakan anggota Gereja yang wajib aktif dan bertanggungjawab dalam kebijakan dan karya misi Gereja. Kemandirian hanya dapat dilihat melalui kualitas umat yang hidup dalam persaudaraan dan cinta kasih dengan berpedoman pada ajaran Yesus.

Gereja dalam setiap konteks pastoral berusaha meningkatkan strategi-strategi demi menciptakan kemandirian dalam kehidupan menggereja. Strategi pada konteks pastoral di wilayah kota tentu berbeda dengan pendekatan masalah di perkampungan. Masalah umum yang sering terjadi ialah kurangnya kesadaran umat yang mengakibatkan rendahnya kualitas partisipasi umat kepada Gereja. Meskipun memiliki permasalahan yang sama, gejala-gejala awal antara di kota dan desa tentu berbeda. Masalah konteks pastoral di kota berkaitan dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat. Perkembangan ini menyebabkan sebagian anggota Gereja lebih menyibukkan diri dengan alat-alat dan media digital. Sedangkan konteks pastoral di kampung berkaitan dengan minimnya sumber daya manusia yang meskipun banyak orang yang berkontribusi tetapi kualitasnya kurang.

Melalui judul tulisan **Membayar Pajak Secara Benar dalam Matius 22:15-22 sebagai Inspirasi Upaya Penyadaran Umat Meningkatkan Kemandirian Kehidupan Menggereja** penulis hendak menjelaskan bahwa ajaran Yesus agar patuh kepada Allah dan juga kepada kaisar dalam Mat. 22:15-22 semestinya menjadi titik tolak kesadaran umat Kristen masa sekarang dalam

berkontribusi bagi kemandirian kehidupan menggereja. Cara hidup jemaat perdana memperlihatkan bahwa bangunan bukan menjadi penentu kehidupan suatu Gereja melainkan bagaimana kualitas umat yang dibangun dalam persekutuan sesuai ajaran Yesus. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mau menyarankan model sikap bagi umat Kristen sebagai upaya peningkatan kesadaran kemandirian kehidupan menggereja.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini ialah bagaimana membayar pajak secara benar dalam Matius 22:15-22 dapat dipakai sebagai inspirasi upaya kesadaran umat meningkatkan kemandirian kehidupan menggereja? Selain itu, masalah turunan yang diangkat di dalam tulisan ini ialah *pertama*, apa makna "membayar pajak secara benar" dalam perikop Injil Matius 22:15-22. *Kedua*, bagaimana ajaran Yesus tentang kepatuhan kepada negara memberi model sikap umat dalam meningkatkan kemandirian Gereja. *Ketiga*, bagaimana penerapan ajaran "membayar pajak secara benar" bagi upaya-upaya umat meningkatkan kemandirian kehidupan menggereja. *Keempat*, model-model sikap apa saja yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kesadaran kemandirian kehidupan menggereja.

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, menjelaskan makna "membayar pajak secara benar" dalam perikop Injil Matius 22:15-22. *Kedua*, untuk memahami ajaran Yesus tentang kepatuhan kepada negara sebagai model sikap umat dalam meningkatkan kemandirian Gereja. *Ketiga*, untuk menguraikan penerapan "membayar pajak secara benar" bagi upaya-upaya umat membangun kemandirian Gereja. *Keempat*, untuk menguraikan model-model sikap yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kemandirian kehidupan menggereja..

1.4 METODE PENULISAN

Dalam tulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Pelbagai informasi yang memperkaya serta yang menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan, penulis dapatkan dari buku-buku perpustakaan dan juga artikel-artikel baik itu dalam jurnal maupun artikel dari internet.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis membagi pokok bahasan ke dalam empat bab. Berikut ini adalah pembagian bab beserta kajian setiap bab.

Bab I memuat latar belakang tulisan yang memuat alasan pemilihan judul. Selain itu, penulis menguraikan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan tema serta tujuan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan karya ilmiah ini.

Bab II memuat isi tentang penjelasan makna membayar pajak seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil Mat. 22:15-22. Pada bab ini penulis menjelaskan relasi antara orang Yahudi, raja setempat, dan penguasa Roma dalam konteks membayar pajak serta situasi budaya dan politik yang berpengaruh pada masa tersebut.

Bab III memuat pemahaman tentang Gereja dan kemandirian Gereja, kemudian tantangan yang menghambat kemandirian Gereja. Bab ini menjelaskan bagaimana relasi yang tercipta antara umat dan Gereja sebagai upaya meningkatkan kesadaran kemandirian kehidupan menggereja.

Bab IV memuat isi tentang pemahaman konteks “membayar pajak yang benar” sebagai model sikap umat untuk menciptakan upaya-upaya dalam meningkatkan penyadaran kemandirian kehidupan menggereja.

Bab V memuat kesimpulan dan saran dari tulisan ini agar umat dapat memahami maksud dari perkataan Yesus sebagai basis kehidupan menggereja.